Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 9767-9779
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Aris Setiawan, Listya Sugiyarti*
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
ariss1382@gmail.com, listya.sugiarti@unpam.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance dan Biaya Operasional secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang, untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang, untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang, untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 – 2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling diperoleh 100 data laporan keuangan dari 20 perusahaan yang terpilih sebagai sampel dengan tahun pengamatan selama 5 tahun. Karakteristik perusahaan diukur menggunakan Logaritma Natural (Total Aset), Good Corporarte Governance diukur menggunakan proporsi Komisaris Independen, biaya operasional diukur berdasarkan biaya penjualan ditambah biaya administrasi dan umum dan Pajak Penghasilan Badan Terutang diukur menggunakan pajak fiskal dikali tarif pajak. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance dan Biaya Operasional secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Kemudian secara parsial Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance dan Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Kata kunci: Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance, Biaya Operasional, Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Abstract

This study aims to determine the influence of Company Characteristics, Good Corporate Governance and Operational Costs simultaneously on Accounts Receivable Corporate Income Tax, to test and evaluate the influence of Company Characteristics on Accounts Receivable Corporate Income Tax, to test and evaluate the influence of Good Corporate Governance on Accounts Receivable Corporate Income Tax, to test and evaluate the influence of Operating Costs on Corporate Income Tax Receivables in property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020 – 2024. The research uses a quantitative method with secondary data obtained from the company's financial statements and annual reports. The sampling technique using purposive sampling obtained 100 financial statement data from 20 selected companies as a sample with an observation year of 5 years. Company characteristics are measured using Natural Logarithm (Total Assets), Good Corporate Governance is measured using the proportion of Independent Commissioners, operational costs are measured based on sales costs plus administrative and general costs and Receivables Corporate Income Tax is measured using fiscal taxes multiplied by tax rates. Data analysis was carried out using panel data regression with the help of the EViews 13 application.. The results of the study show that Company Characteristics, Good Corporate Governance and Operational Costs simultaneously affect the Income Tax of Debtable Entities. Then partially the Company Characteristics, Good Corporate Governance and Operating Costs do not affect the Income Tax of the Debtable Entity.

Keyword: Company Characteristics, Good Corporate Governance, Operational Costs, Income Tax of Debtable Entities.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi negara tidak dapat dilepaskan dari peran sektor publik dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling penting dan berperan penting dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan ini, pajak menjadi solusi utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia (Didi Handono Syahputra et al., 2024).

Pajak sangat penting di Indonesia, berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang berkontribusi terhadap pembangunan negara yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi tantangan, terutama di kalangan wajib pajak, karena rendahnya tingkat kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan. Karena pajak bersifat wajib dan hasil atau pengembaliannya tidak langsung terlihat, sebagian wajib pajak masih menganggap membayar pajak bukan kewajiban, melainkan beban. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggunakan metode untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak (Indrati & Marceggiani, 2023).

Tahun 2024 menjadi tahun bersejarah bagi sektor properti Indonesia. Data Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa investasi properti yang telah selesai di sub sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran mencapai total Rp122,9 triliun pada tahun 2024, menempatkan sektor ini di peringkat lima besar. Pencapaian ini menunjukkan bahwa, terlepas dari tantangan ekonomi global, sektor properti Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik (Kompas.com, 2024). Data Bank Indonesia menunjukkan kredit properti tumbuh sekitar 7,8% (year-on-year) pada kuartal pertama tahun 2024, dengan penyaluran kredit mencapai Rp1,351 triliun pada April 2024. Peningkatan kredit properti ini mencerminkan permintaan properti yang terus kuat dan optimisme sektor perbankan terhadap prospek sektor ini. Peningkatan ini juga menunjukkan pemulihan di sektor properti setelah tekanan akibat pandemi COVID-19 (keuangan.kontan.co.id, 2024).

Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) tahun 2024, data menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) tahun 2024 mencapai Rp 1.931,6 triliun dari total pendapatan sebesar Rp 2.231,8 triliun. Realisasi APBN-P 2024 pada sektor pajak meningkat dibandingkan APBN-P tahun 2023 mencapai 3,41 persen dibandingkan penerimaan periode yang sama di tahun 2023 (Media.kemenkeu.go.id, 2024).

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau wajib pajak yang berbentuk badan hukum atas penghasilan yang diterimanya, yang mana penghasilan tersebut merupakan setiap penambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang berbentuk badan hukum, yang diterima di dalam negeri atau di luar negeri untuk tujuan apapun (Lubis & Dinanti, 2022). Pajak Penghasilan badan digunakan untuk mengukur beban pajak penghasilan perusahaan. Pendapatan bersih perusahaan dapat ditentukan dari total pendapatan perusahaan dikurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Sehingga mendapatkan penghasilan kena pajak dan dikalikan dengan angsuran pajak penghasilan. Perhitungan ini memberikan informasi ke perusahaan seberapa banyak pajak yang dibayarkan. Seiring berkembangnya transaksi bisnis, baik domestik maupun lintas batas, pendapatan bisnis dapat dikurangi dengan menggunakan berbagai peraturan pajak. Pajak merupakan beban bagi perusahaan dan akan mengurangi pendapatan, sehingga dalam hal ini manajemen perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak dalam jumlah sesedikit mungkin.

Pajak penghasilan badan yang harus dibayar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan erat dengan situasi internal perusahaan, di antara faktornya adalah yang akan diteliti oleh penulis seperti karakteristik perusahaan, Good Corporate Governance dan biaya operasional. Pajak penghasilan badan yang harus dibayar mengacu pada pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara atas penghasilan kena pajaknya dalam satu tahun pajak. Jumlah ini dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan, efektivitas tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), dan efisiensi manajemen biaya operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat kompleksitas bisnis yang tinggi akan dapat dengan mudah terlibat dalam perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak. Perpajakan adalah tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk bisnis. Namun, dengan karakteristik Perusahaan, Perusahaan dapat membayar pajak yang lebih rendah dengan mengelola pajak mereka. Dari perspektif pajak, inflasi mengurangi jumlah uang yang harus dibayar perusahaan.

Karakteristik dari suatu perusahaan adalah sifat yang sudah melekat atau bisa disebut sebagai suatu ciri khas pada sebuah entitas usaha yang mampu terlihat dari berbagai arah. Menurut sub sektor lapangan usaha dan bentuk badan hukum, Karakteristik perusahaan yang memengaruhi pengungkapan risiko diatur dalam keputusan ketua BAPEPAM dan lembaga keuangan nomor: KEP-134/BL/2006 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, bahwa perusahaan harus menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Adapun fenomena yang mengkhawatirkan dan Kementerian Keuangan telah melaporkan bahwa praktik ini dapat menyebabkan kerugian. Temuan tersebut dipaparkan oleh Tax Justice Network, yang melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan sekitar $4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 miliar. (Kontan.co.id, 2022).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pada tahun 2019 terdapat kasus PT Bhakti Agung Propertindo (BAPI) bermula dari proyek pembangunan apartemen di Kota Tangerang, yang dilakukan bersama dengan PT APIK sebagai penyedia jasa konstruksi. Dalam kegiatan ini, PT BAPI diduga tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) secara berturut-turut untuk beberapa periode pajak. Berdasarkan penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak, tindakan ini menyebabkan kerugian negara minimal sebesar Rp 2,9 miliar. Karena pelanggaran ini, PT BAPI kemudian ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus tindak pidana pajak, dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di sektor property dan real estate masih menjadi tantangan, jadi penting untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan pemantauan pajak yang lebih efektif agar bisa meminimalkan pelanggaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024; Liputan6.com, 2024). Fenomena ini membuktikan bahwa banyak perusahaan pada sektor property dan real estate di Indonesia yang masih menghindari pajak.

Perusahaan yang terdaftar di Indonesia diklasifikasikan sebagai perusahaan kena pajak. Penghasilan perusahaan adalah pajak penghasilan badan (PKP). Di Indonesia, perusahaan tidak hanya harus membayar pajak tetapi juga mematuhi tata kelola perusahaan (GCG). Good Corporate Governance (GCG) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Sabrina N.N, 2021). Good Corporate Governance dapat memberikan feedback yang positif kepada investor. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem Good Corporate Governance maka akan semakin baik pula respons investor terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Penerapan Good Corporate Governance dapat meminimalisir masalah keagenan, mampu memberikan jaminan bagi investor bahwa investasi dalam perusahaan telah dikelola secara efisien menumbuhkan kegiatan operasional yang optimal demi pencapaian tujuan perusahaan (Aimi & Padnyawati, 2023).

Selanjutnya dalam mengatur perusahaan memerlukan biaya untuk menunjang operasional. Semakin tinggi biaya operasi yang dikeluarkan perusahaan, semakin rendah pajak yang dibayarkan perusahaan. Namun, di sisi lain, perusahaan juga berharap dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan menghemat biaya operasional sebanyak mungkin. Biaya operasional tidak lepas dari pajak penghasilan badan di mana biaya operasional tersebut dapat menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan wajib pajak badan (Apipih, 2024). Biaya operasional merupakan seluruh biaya komersial dikeluarkan untuk menunjang atau menunjang kegiatan atau kegiatan perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan, dan biaya operasional juga merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Pada umumnya pada perusahaan terdapat laporan laba-rugi, laporan ini terdapat biaya-biaya operasional yang mempengaruhi pendapatan (laba-rugi) usaha perusahaan. Perusahaan harus menekan biaya operasional agar memperoleh laba sesuai dengan yang sudah ditargetkan.

Penelitian mengenai pajak penghasilan badan terutang sudah banyak diteliti di antaranya adalah dilakukan oleh (Mutiara Geofanny & Sastri, 2024a) didapatkan hasil bahwasanya biaya operasional berpengaruh dengan arah positif terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan berdasarkan (Sjahputra & Hunein, 2024) bahwasanya biaya operasional berpengaruh negative dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat perbedaan dalam penggunaan variabel objek penelitian, serta hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pajak penghasilan badan terutang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya menguji biaya operasional, tetapi juga menguji karakteristik perusahaan dan good corporate governance sebagai variabel independen terhadap pajak penghasilan badan terutang. Selain itu penelitian ini secara khusus menggunakan perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun pengamatan tahun 2020 – 2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pajak penghasilan badan yang harus dibayar, dan memberikan gambaran empiris tentang peran karakteristik perusahaan, Good Corporate Governance perusahaan yang baik, dan biaya operasional dalam menentukan pajak penghasilan badan terutang yang harus dibayar. Perbedaan tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik perusahaan, good corporate governance dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1.1. Landasan Teori

Teori agensi merupakan hubungan keagenan sebagai kontrak, di mana satu atau beberapa orang (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan keagenan dapat memicu permasalahan karena perbedaan kepentingan antara agent dan principal, yang dapat menyebabkan konflik. Konflik kepentingan antara principal dan agent disebabkan karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kemauan dari principal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Berkaitan tentang teori keagenan, Good Corporate Governance adalah sebuah konsep yang didasarkan pada teori keagenan yang diharapkan dapat menjadi sebuah konsep yang memberikan keyakinan kepada investor atas pengembalian dana yang mereka investasikan pada suatu perusahaan, Che Haat et al (2008) dalam (Purno dan Khafid; 2013; 4194) berpendapat bahwa untuk mengatasi konflik keagenan diperlukan pedoman yang lebih baik yaitu adanya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan.

Teori sinyal menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor) (Michael Spence, 1973). Teori sinyal juga menjelaskan upaya perusahaan untuk memberikan sinyal yang baik kepada pihak eksternal, termasuk informasi keuangan, investor, atau kreditor, untuk memperoleh modal dalam bentuk saham. Hubungan antara teori sinyal dan biaya operasional mencakup informasi keuangan yang digunakan dalam semua operasional perusahaan. Tidak ada perusahaan yang dapat melakukan bisnisnya tanpa biaya operasional untuk memastikan keberlanjutan semua kegiatannya. Karena besarnya biaya operasional mempengaruhi laba yang dibuat oleh perusahaan, manajemen perusahaan harus secara efektif mengendalikan biaya operasional karena investor bersedia berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan.

1.2. Hipotesis

Karakteristik Perusahaan, Good Coporate Governance dan Biaya Operasional Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi secara simultan atau bersama-sama pengaruh karakteristik perusahaan, *good corporate governance* dan biaya operasional berpengaruh terhadap utang pajak penghasilan badan. Semakin tinggi tingkat struktur perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat pajak yang dibayar oleh perusahaan, karena pajak penghasilan badan yang terutang akan dipungut berdasarkan jumlah yang diterima oleh perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan juga mengeluarkan biaya-biaya pendukung, salah satunya adalah biaya operasional. Biaya operasional mengacu pada sejumlah biaya tertentu yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terkait dengan aktivitas operasinya. Biaya-biaya tersebut dicatat sebagai pengurang pendapatan pada laporan laba rugi, yang tentunya akan berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik perusahaan, *good corporate governance* dan biaya operasional secara simultan atau secara bersama – sama mempengaruhi laba perusahaan sehingga pajak penghasilan badan terutang juga akan terpengaruh. Oleh sebab itu, maka hipotesis yang ingin diajukan, yaitu:

H1: Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance* dan Biaya Operasional Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Karakteristik Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Ukuran perusahaan merupakan indikator kondisi atau karakteristik suatu organisasi untuk mengetahui besar kecilnya perusahaan (Alsafy et al., 2025). Ada tiga faktor utama yang dapat menjelaskan ukuran perusahaan, yaitu total ukuran aset, total penjualan, dan total kapitalisasi pasar (Indradi, Donny ; Sulistyowati, 2024). Menurut teori keagenan, hubungan antara ukuran perusahaan dan pajak perusahaan adalah ketika kepentingan entitas dalam memperoleh keuntungan dari aset yang dikuasainya meningkat maka aset perusahaan meningkat, maka beban penyusutan juga meningkat, namun besarnya pajak penghasilan bisa berkurang. Dikurangi dengan mengurangi beban penyusutan PKP hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

H2 : Karakteristik Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

***Good Corporate Governance* Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Good Corporate Governance dapat disebut juga dengan *Good Governance* atau *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Di sisi lain, teori agensi menggambarkan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen). *Good Corporate Governance* (GCG) berperan sebagai alat monitoring yang krusial dalam mengurangi asimetri informasi antara agent dan prinsipal. Manajer yang mempunyai relasi dengan pihak pemerintah bisa memanfaatkan keistimewaan mereka untuk membuat keputusan yang menguntungkan secara ekonomi, seperti pembayaran pajak penghasilan badan. Penerapan good corporate governance dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil.

H3 : *Good Corporate Governance* Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Biaya Operasional Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Biaya operasional berkaitan dengan pajak penghasilan karena biaya tertentu dikeluarkan perusahaan dapat menjadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak. Semakin besar biaya operasional yang dapat dibebankan secara fiskal, maka laba kena pajak dapat menjadi lebih rendah sehingga pajak penghasilan badan terutang juga dapat menurun. Sebaliknya, apabila biaya operasional yang dapat dibebankan secara fiskal lebih rendah, maka laba kena pajak menjadi lebih tinggi sehingga pajak penghasilan badan terutang yang harus dibayarkan perusahaan dapat meningkat. Konsep biaya merujuk pada nilai atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk memastikan tercapainya manfaat tertentu. Pengeluaran atau pengorbanan ini tercermin dalam akuntansi keuangan melalui penyusutan kas atau aset lainnya. Biaya yang timbul dan dicatat dalam laporan laba rugi kemudian disebut sebagai beban. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan akan mengeluarkan biaya sebagai bagian dari dukungan operasionalnya (Apipih, 2024).

Pelaku usaha mengeluarkan biaya penunjang dalam kegiatan usahanya, salah satunya adalah biaya operasional. Sejumlah biaya tertentu yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sehubungan dengan kegiatan operasinya disebut biaya operasi. Biaya-biaya tersebut dikurangkan dari penghasilan dalam laporan laba rugi dan tentunya mempengaruhi laba yang menjadi dasar penghitungan penghasilan kena pajak atau laba fiskal dan dengan demikian besarnya pajak penghasilan badan yang terutang oleh perusahaan.

Dalam teori signaling, perusahaan yang lebih besar dengan prospek yang berkembang yang baik cenderung memberikan sinyal positif kepada investor melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Seiring dengan pertumbuhan dan perluasan perusahaan, maka aktivitas operasional perusahaan juga meningkat sehingga kebutuhan terhadap biaya operasional menjadi lebih besar. Peningkatan biaya operasional dapat mencerminkan meningkatnya aktivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, peningkatan biaya operasional tidak selalu meningkatkan laba dan pajak penghasilan badan terutang, karena pengaruhnya terhadap laba juga bergantung pada tingkat pendapatan dan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya tersebut. Sehingga informasi mengenai biaya operasional dapat menjadi bagian dari informasi keuangan yang mencerminkan kondisi dan aktivitas perusahaan kepada pihak eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Apipih, 2024) menyimpulkan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Kenaikan biaya operasional sering kali menyertai peningkatan aktivitas operasional suatu perusahaan. Semakin besar operasional perusahaan maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan dampaknya terhadap peningkatan pajak penghasilan yang dibayarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Biaya Operasional Berpengaruh Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyediakan data numerik yang menghubungkan variabel-variabel penelitian dan menggunakan metode asosiatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang di publikasikan di website resmi Bursa Efek Indonesia atau web resmi perusahaan terkait dengan cara mengunduh data tersebut dari tahun 2020 - 2024 pada perusahaan sektor property dan real estate. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan EViews 13 dengan teknik regresi data panel.

Populasi penelitian terdiri atas 92 perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan sektor property dan real estate selama periode penelitian, yakni 2020 - 2024. (2) Perusahaan yang konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode tahun 2020 - 2024 berturut – turut. (3) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan sektor property dan real estate yang mendapatkan laba tahun 2020 - 2024. (4) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan property dan real estate yang menggunakan mata uang rupiah.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 20 perusahaan sebagai sampel dengan lima tahun pengamatan sehingga menghasilkan 100 observasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskesdastisitas, autokorelasi), pengujian koefisiensi determinasi (R^2 analisis regresi data panel, dan pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan empat variabel penelitian yang terdiri dari satu variabel dependen dan 3 variabel independen.

2.1 Pengukuran Variabel

Pajak Penghasilan Badan Terutang

Menurut penelitian (Mutiara Geofany & Sastri, 2024) Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang di kenakan terhadap badan atau perusahaan dalam tahun berjalan sesuai perubahan ke empat tentang PPh yakni Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008. Penghasilan kena pajak didapat dari koreksi fiskal laporan laba/rugi yang disebut juga dengan laba fiscal, dengan rumus:

Pajak Penghasilan Badan Terutang = Laba Fiskal x Tarif PPh Badan.

Karakteristik Perusahaan

Berdasarkan penelitian (Rahma et al., 2022) ukuran perusahaan dihitung dari jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, dikarenakan jumlah aktiva setiap perusahaan berbeda dan nilainya besar, agar tidak menimbulkan nilai ekstrem maka total aset akan di ubah menjadi logaritma natural, dengan rumus:

Ukuran Perusahaan = Log Natural (Total

Good Coorporate Governance

Berdasarkan penelitian (Lee, Robert; Evyanto, 2022) Good Corporate Governance merupakan suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan, dengan rumus:

$$\text{DKI} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}}$$

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Biaya Operasional

Berdasarkan penelitian (Mutiara Geofanny & Sastri, 2024a) Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menunjang berjalannya kegiatan usaha di perusahaan. Biaya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya umum, dengan rumus:

Biaya Operasional = Biaya Penjualan + Biaya Administrasi dan Umum

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran karakteristik data penelitian yang terdiri atas variabel independen karakteristik perusahaan, *good corporate governance*, biaya operasional serta dengan variabel dependen pajak penghasilan badan terutang. Berdasarkan 100 observasi periode tahun 2020-2024 pada sektor *property* dan *real estate*. Variabel karakteristik perusahaan menunjukkan nilai mean sebesar 29,14991. Nilai maximum sebesar 31,96206 sedangkan nilai minimum sebesar 26,06370, dengan standar deviasi sebesar 1,600681. Pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki nilai karakteristik perusahaan tertinggi yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk. pada tahun 2024, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai karakteristik terendah yaitu PT Grand House Mulia Tbk. pada tahun 2024.

Variabel good corporate governance menunjukkan nilai mean sebesar 0,384513. Nilai maximum sebesar 0,600000 sedangkan nilai minimum sebesar 0,250000 dengan standar deviasi sebesar 0,092313. Pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki nilai good corporate governance tertinggi yaitu PT Summarecon Agung Tbk. pada tahun 2020 – 2022, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai good corporate governance terendah yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk. pada tahun 2020 – 2024, PT Puradelta Lestari Tbk. pada tahun 2020 – 2024 dan PT Makmur Berkah Amanda Tbk. pada tahun 2024.

Variabel biaya operasional menunjukkan nilai mean sebesar 4.64E+11. Nilai maximum sebesar 3,94E+12 sedangkan nilai minimum sebesar 3,94E+12 dengan standar deviasi sebesar 7,25E+11. Pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki biaya operasional tertinggi yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk. pada tahun 2024, sedangkan perusahaan yang memiliki biaya operasional terendah yaitu PT Repower Asia Indonesia Tbk. pada tahun 2022.

Variabel pajak penghasilan badan terutang menunjukkan nilai mean sebesar 1,14E+10. Nilai maximum sebesar 6,59E+10 sedangkan nilai minimum sebesar 5177180, dengan standar deviasi sebesar 1.61E+10. Pada penelitian ini, perusahaan yang memiliki nilai pajak penghasilan badan terutang tertinggi yaitu PT Ciputra Development Tbk. pada tahun 2024, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai pajak penghasilan badan terutang terendah yaitu PT Roda Vivatex Tbk. pada tahun 2023

3.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tahap pengujian model regresi data panel dilakukan untuk memilih model estimasi yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Model yang dibandingkan meliputi *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa uji Chow menghasilkan probabilitas kurang dari 0,05, sehingga FEM lebih tepat dibandingkan CEM. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan probabilitas lebih dari 0,05, sehingga REM dipilih dibandingkan FEM. Selanjutnya, uji *Lagrange Multiplier* diperoleh nilai *Probability Cross-section Breusch-Pagan* sebesar 0,0000, sehingga model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model data panel yang telah dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM), diperoleh kesimpulan bahwa model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.3. Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian diagnostik menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Korelasi tertinggi antarvariabel independen hanya sebesar 0,72688, jauh di bawah batas 0,90, sehingga tidak terdapat indikasi hubungan linear yang kuat antarvariabel independen. Pengujian heteroskedastisitas juga menunjukkan probabilitas masing-masing variabel sebesar 0,6168; 0,1352; dan 0,5792, sehingga tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas. Selanjutnya, nilai Durbin-Watson sebesar 1,229858 menunjukkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,000303, yang secara statistik menunjukkan bahwa residual belum berdistribusi normal pada tingkat signifikansi 5%. Meskipun demikian, penelitian ini menggunakan 100 observasi, sehingga berdasarkan pertimbangan *Central Limit Theorem*, distribusi estimator regresi dapat disimpulkan data berdistribusi normal seiring meningkatnya ukuran sampel. Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk tetap melanjutkan analisis regresi meskipun hasil pengujian normalitas secara statistik menunjukkan penyimpangan dari distribusi normal (Ruth Pranadipta & Natsir, 2023). Sementara itu, hasil pengujian multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi menunjukkan bahwa model tidak mengalami permasalahan pada ketiga aspek tersebut. Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil pengujian diagnostik, model regresi selanjutnya digunakan untuk pengujian hipotesis.

3.4. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.11241931840601 atau 11,24%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel karakteristik perusahaan, *good corporate governance* dan biaya operasional mampu menjelaskan variasi pajak penghasilan badan terutang sebesar 11,24%. Sementara itu, sisanya sebesar 88,76% (100% - 11,24% = 88,76%) dijelaskan oleh faktor - faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.5. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel penelitian ini menggunakan Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil pengujian, persamaan regresi data panel diperoleh sebagai berikut:

$$Y = -81558223097.140\ (C) + 3463719488{,}347\ (X1) - 28197614911{,}130\ (X2) + 0.006\ (X3) + e$$

Nilai konstanta sebesar − 81558223097,140 menunjukkan bahwa apabila variabel karakteristik perusahaan (X1), good corporate governance (X2) dan biaya operasional dianggap konstan atau bernilai nol, maka pajak penghasilan badan terutang diperkirakan sebesar − 81558223097,140. Nilai koefisien variabel karakteristik perusahaan (X1) sebesar 3463719488,347 menunjukkan bahwa setiap peningkatan karakteristik perusahaan sebesar satu satuan akan menyebabkan nilai perusahaan menurun sebesar 3463719488,347, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Sebaliknya, apabila karakteristik perusahaan mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 3463719488,347. Nilai koefisien variabel good corporate governance (X2) sebesar −28197614911,130 menunjukkan bahwa setiap peningkatan good corporate governance sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar −28197614911,130, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Sebaliknya, apabila good corporate governance mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka nilai perusahaan akan menurun sebesar −28197614911,130. Nilai koefisien variabel biaya perusahaan (X3) sebesar 0.006 menunjukkan bahwa setiap peningkatan biaya operasional sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 0.006, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.6. Uji Hipotesis

Tabel 1. Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.139	Mean dependent var	3353185735.091
Adjusted R-squared	0.112	S.D. dependent var	8757976039.064
S.E. of regression	8251020634.942	Sum squared resid	6.536
F-statistic	5.180	Durbin-Watson stat	1.230
Prob(F-statistic)	0.002		

Sumber: diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.002. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0.002 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel karakteristik perusahaan (X1), good corporate governance (X2) dan biaya operasional (X3) secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang (Y). Hasil tersebut menunjukkan karakteristik perusahaan, good corporate governance dan biaya operasional memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*.

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-81558223097.140	62076909340.792	-1.313825445938	0.192
SIZE	3463719488.347	2136434564.713	1.621261678478	0.108
GCG	-28197614911.130	20689473464.766	-1.362896690398	0.176
BOPR	0.006	0.004	1.627341784939	0.107

Sumber: diolah oleh penulis (2026)

Secara parsial, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel karakteristik perusahaan memiliki nilai probabilitas 0,108, sehingga tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Variabel *good corporate governance* juga tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan probabilitas 0,176. Sebaliknya, variabel biaya operasional memiliki probabilitas 0,107, sehingga tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Dengan demikian, dari tiga variabel independen yang diuji, tidak terbukti berpengaruh secara statistik.

Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance dan Biaya Operasional secara simultan memiliki prob(F-statistic) sebesar 0.002 yang berada di bawah Tingkat signifikansi 0,05 (0.002 < 0,05) hasil pengujian menunjukan hipotesis ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance dan Biaya Operasional secara bersama – sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Badan Terutang tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel, tetapi dapat dipengaruhi oleh kombinasi antara kondisi karakteristik perusahaan, penerapan good corporate governance perusahaan serta aktivitas operasional perusahaan. Karakteristik dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran perusahaan dapat menggambarkan skala sumber daya dan aktivitas ekonomi perusahaan, Good Corporate Governance

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mencerminkan mekanisme pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan Keputusan dan biaya operasional berkaitan dengan pengeluaran yang timbul dari aktivitas operasional yang dapat memengaruhi laba perusahaan sebagai salah satu dasar dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan terutang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sektor property dan real estate perlu mempertimbangkan beberapa faktor secara bersamaan, bukan hanya melihat satu variabel secara terpisah. Secara simultan, variabel tersebut menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan, good corporate governance dan biaya operasional merupakan faktor yang saling berkaitan dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang selama periode penelitian 2020 – 2024.

Pengaruh Karakteristik Perusahaan, terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil pengujian variabel Karakteristik Perusahaan memiliki nilai probability sebesar 0.108 > 0,05 yang artinya nilai probability tersebut lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukan hipotesis ini ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Karakteristik Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Donny Indradi dan Eni Sulistyowati (2024) dan Nurfadilla Febriana, Nur'aini Yusuf (2025) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan.

Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proxy ukuran perusahaan yang menggambarkan skala operasi perusahaan yang dapat dilihat dari Logaritma Natural (total aset). Ukuran perusahaan digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya skala perusahaan berdasarkan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan secara umum menunjukkan bahwa perusahaan memiliki skala operasi yang besar. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya total aset yang dimiliki perusahaan tidak secara langsung menentukan besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hasil uji menunjukkan ukuran perusahaan belum cukup kuat untuk mengubah besaran pajak penghasilan badan terutang. Besarnya pajak yang harus dibayarkan lebih berkaitan dengan besarnya penghasilan kena pajak setelah memperhitungkan pendapatan dan biaya yang diakui berdasarkan ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian perusahaan dengan ukuran yang lebih besar maupun lebih kecil memiliku kemungkinan untuk memiliki Pajak Penghasilan Badan Terutang yang relatif berbeda, tergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba fiskal dan kondisi keuangan perusahaan pada periode penelitian.

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil pengujian variabel *Good Corporate Governance* memiliki nilai probability sebesar 0.176 > 0,05 yang artinya nilai probability tersebut lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukan hipotesis ini ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashar Basyir, Istichanah (2022) yang menyatakan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan. Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola perusahaan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan stakeholder serta tidak melakukan tindakan yang ilegal atau tidak etis. Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap manajemen dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perusahaan maupun peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, yaitu rasio jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris. Komisaris independen memiliki fungsi utama dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan manajemen serta memberikan penilaian secara objektif terhadap pengelolaan perusahaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* belum menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang. Sedangkan besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang lebih berkaitan dengan besarnya penghasilan kena pajak dan kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu peningkatan atau penurunan proporsi komisaris independen tidak secara langsung menyebabkan perubahan besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Hasil pengujian variabel Biaya Operasional memiliki nilai probability sebesar 0.107 > 0,05 yang artinya nilai probability tersebut lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukan hipotesis ini ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilla Febriana, Nur'aini Yusuf (2025) yang menyatakan bahwa Biaya operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Biaya operasional diukur dari total biaya penjualan ditambah dengan biaya administrasi dan umum. Berdasarkan teori signaling, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat menjadi sinyal bagi pihak eksternal dalam menilai kondisi dan aktivitas perusahaan. Biaya operasional yang meningkat dapat mencerminkan adanya peningkatan aktivitas operasional perusahaan. Akan tetapi, peningkatan biaya operasional tidak selalu memberikan sinyal yang secara langsung menunjukkan peningkatan atau penurunan pajak penghasilan badan terutang, karena pengaruh biaya tersebut terhadap laba juga bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya.

Secara teoritis, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin kecil laba bersih yang diperoleh perusahaan dan semakin kecil pajak penghasilan badan yang terutang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan biaya operasional tidak secara langsung menentukan besarnya pajak penghasilan badan terutang. Hal ini dapat terjadi karena besarnya pajak penghasilan badan terutang tidak hanya ditentukan oleh biaya operasional, tetapi juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, koreksi fiskal, serta komponen lain yang diperhitungkan dalam menentukan laba fiskal. Oleh sebab itu biaya operasional tidak

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Diperoleh sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 20 perusahaan dengan jumlah observasi data sejumlah 100. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance*, dan Biaya Operasional secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Secara parsial, Karakteristik Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan yang diukur dari total aset tidak mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan terutang. Selain itu, *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi dewan komisaris independen belum cukup mampu mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan. Sementara itu, secara parsial Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan tidak mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan yang terutang.

Bagi Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar setiap kebijakan yang diambil, termasuk kebijakan perpajakan, tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Bagi Investor diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola perusahaan dan tanggung jawab lingkungan sebagai indikator keberlanjutan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Investor juga disarankan untuk menggunakan informasi Pajak Penghasilan Badan Terutang sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi Peneliti Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teori keagenan (agency theory) dan teori sinyal (signaling theory) dalam konteks perpajakan di Indonesia.

Reference

1. Aimi, A. N., & Padnyawati, K. D. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada PT. Inatel Nusantara. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(2), 286–294. https://doi.org/10.32795/hak.v4i2.3316
2. Alifia Safira Dewi, R., & Yoosita, A. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional DanStruktur Modal Terhadap Pajak

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Penghasilan BadanTerutang Dengan Profitabilitas Sebagai VariabelModerasi Pt. Catur Sentosa Adiprana. *Soetomo Accounting Review*, *1*(3), 322–356.

3. Alsafy, M. A. M., Abd-Elhafeez, H. H., Rashwan, A. M., Erasha, A., Ali, S., El-Gendy, S. A. A., SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, T., Rundlet, E. J. E. J. E. J., Jeon, Y. E., Collins, L. N. L. N., Huber, F. M. F. M., Lin, D. D. H. D. H., Paduch, M., Koide, A., Lu, V. T., … Owlia, P. (2025). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Frontiers in Veterinary Science*, *13*(1), 1–16. https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00253-025-13460-y%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14088%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.019%0Ahttps://doi.org/10.1016/j
4. Apipih. (2024). Pengaruh Struktur, Biaya Operasional Dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(8), 464–475. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/download/6485/3097
5. Arisandy, N. (2021). The Effect of Capital Structure, Earnings Management, Operating Costs and Tax Planning on Corporate Income Tax Payable in Property and Real Estate Companies Listed on the IDX in 2017-2020. *The Journal of Taxation : Tax Center*, *1*(2), 31–61.
6. Didi Handono Syahputra, Muhammad Rizky Putra, & Agung Anantha. (2024). Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *2*(3), 335–348. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.2072
7. Febriana, N. & N. Y. (2025). *Nur'aini Yusuf Universitas Pamulang*. *2*(2), 899–921.
8. Hazanah, S., & Hasanuh, N. (2022). the Effect of Capital Structure and Operational Costs on Agency'S Pph Payable. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *6*(2), 191–199. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
9. Indradi, Donny ; Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Komersial. *Applied Managerial Accounting*, *8*(1), 97–108.
10. Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). *Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis*. *7*(2), 766–783.
11. Kadjiman, C. N., & Tangkau, J. (2022). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governanace Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 517–526. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3206
12. Lee, Robert; Evyanto, W. (2022). Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 11 No . 1 Juli 2022 E - ISSN : 2654-5837 , Hal 1031 – 1038. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 558–566.
13. Lubis, A. R., & Dinanti, D. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Dan Harmonisasi Perpajakan. *Journal of Financial Economics & Investment*, *2*(3), 135–143. https://doi.org/10.22219/jofei.v2i3.22335
14. Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Nikmatul Fajri, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *I N O V a S I*, *17*(1), 82–93. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI
15. Mayasari, M., & Ariani, A. (2021). Good Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, *2*(2), 135–144. https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.297
16. Merlawati, I., & Tresnawaty, N. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Inensity dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, *4*, 60–70.
17. Minh Tuan Pham1*, Anh Tuan Hoang2, Anh Tuan Le1, Abdel Rahman M.Said Al-Tawaha3, Van Huong Dong2, V. V. L. (2024). *No Title 済無No Title No Title No Title*. *2*(3), 306–312.
18. Mutiara Geofanny, & Sastri, E. T. (2024a). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Nusa Akuntansi*, *1*(3), 646–665. https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.143
19. Mutiara Geofanny, & Sastri, E. T. (2024b). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Nusa Akuntansi*, *1*(3), 646–665. https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.143
20. Nainggolan, D. N. M., Fitrawansyah, F., & Littu, H. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pasal 23 Atas Jasa Sewa Pada PT Putra Tunggal Trans. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 9992–9998.
21. Panjaitan, clara kresensia. (2023). This work is licensed under a Creative Commons Attribution- This work is licensed under a Creative Commons Attribution- ShareAlike 4 . 0 International License . *Jurnal Multidisiplin Saintek*, *45*(1), 1–17. https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index
22. Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, *6*(1), 677–689. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637
23. Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 済無No Title No Title No Title*. *2*(April), 306–312.
24. Ruth Pranadipta, & Natsir, K. (2023). Financial, Non-Financial, and Macro-Economic Factors That Affect the First Day Profit Rate When Conducting Initial Public Offering. *International Journal of Application on Economics and Business*, *1*(2), 276–289. https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.276-289
25. Sabrina, N. N. (2021). Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, *1*(2), 90–96. https://doi.org/10.47709/jebma.v1i2.982
26. Sabrina N.N, S. I. (2021). Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, *1*, 100.
27. Satria, D. (2018). Panel data with stata. *Panel Data With Stata*, 1–17.
28. Siti Lailatus Saidah, & Hwihanus Hwihanus. (2023). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Perusahaan, Struktur Modal, Dan Kinerja Manajemen Terhadap Nilai Perusahaan. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, *2*(4), 424–438. https://doi.org/10.30640/digital.v2i4.2050
29. Sjahputra, A., & Hunein, H. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, *7*(1), 69–79. https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.784
30. Sovita, I., & Firsta. (2019). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan. *Menara Ekonomi*, *V*(3), 60–72.
31. Sujarwati, R., Khoirunisa, I., & Firmansyah, A. (2022). Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility di Indonesia: Pentingkah Earnings Response Coefficient? *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *11*(1), 15–31. https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.37577
32. Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PPh BADAN TERUTANG. *Media Bisnis*, *12*(2), 175–184.
33. Tasrullah, T., Zulaecha, H. E., Hidayat, I., & Kimsen, K. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Profitabilitas

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dan Biaya Operasioanl Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, *4*(2), 162–184. https://doi.org/10.55542/juiim.v4i2.400

34. Wulandari, D. S., & Anjelika, M. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan BiayaOperasional terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badanpada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa EfekIndonesia (BEI) Periode 2015 – 2017. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *6*(1), 111. https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/download/1485/1281
35. Yohana Magdalena, Agustiawan Agustiawan, & R. Septian Armel. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang pada Perusahaan Pertambangan (Periode 2020-2022). *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, *12*(1), 434–454. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.3581

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14258
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)